

**PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR  
SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL**

**Skripsi**



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:**

**Laila Nur Rohmah**

**NIM. 20160610266**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Administrasi Negara  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi  
pada tanggal 11 Februari 2020**

**Dosen Pembimbing**



**Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19680821 199303 1 003**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR**  
**SIPIIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL**

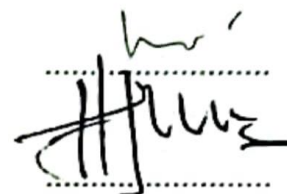
Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendararan.

Pada tanggal 28 Februari 2020 dan dinyatakan lulus.

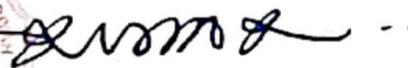
**Tim Penguji**

1. Ketua : Beni Hidayat, S.H., M.Hum.  
NIK. 19731231199804 153 030
2. Anggota : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680821 199303 1 003
3. Anggota : Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIK. 19721228200004 153 046

**Tanda Tangan**



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK 19710409199702 153 028

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laila Nur Rohmah

Nim : 20160610266

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Februari 2020



Laila Nur Rohmah  
NIM. 20160610266

## HALAMAN MOTTO

*“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar”*

**(Q.S Al-Anfal: 66)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'lamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Untuk orangtua saya Bapak Asjudi dan Ibu Binti Mar'ati yang tercinta, terimakasih telah mendidik saya dengan baik dan tegas. Terimakasih atas kasih sayang bapak dan Ibu. Tidak lupa juga terimakasih atas doanya dari Bapak dan Ibu sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang S1 ini dengan baik. Terimakasih untuk semuanya yang telah diberikan.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, karunia pikiran, kesehatan dan segala anugerah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL" untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di zaumul kiyamah.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Bagus sarnawa, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing, memotivasi, memberikan masukan, serta solusi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Bahkan beliau dengan kerendahan hatinya memberi saya literatur untuk dijadikan sebagai pisau analisa bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Bapak Beni Hidayat, S.H.,M.Hum dan Bapak Sunarno, S.H.,M.Hum., Ph.D selaku dosen penguji ujian pendadaran yang selalu membimbing penulisan serta memberi masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah bersedia membimbing serta mengajari ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan yang ditempuh.

6. Terimakasih pula untuk seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada Bawaslu Kabupaten Bantul, Ibu Harlina, S.H., Ibu Dhenok Panuntun TSA, S.H., M.H., dan Bapak Drs. Supardi. Terimakasih atas partisipasinya selama penelitian berlangsung sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
8. Terimakasih untuk adik saya Almira Salsabila yang senantiasa menemani saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Untuk sahabat saya Nanik terima kasih atas doa, motivasi, dan waktunya yang sudah bersedia menemani saya melakukan penelitian.
10. Untuk saudara-saudara saya Rahmat Setyawan, Ajay, dan Rani, terima kasih atas doa, motivasi, dan dukungannya.
11. Untuk teman saya SMA Rachma, Desi, Sufi, Farida, terima kasih atas doa, motivasi, dan dukungannya selama ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Yona, Annisa Rahmasari, Defa, Dhara, Sesar, Rizki, Hanif, Toifur, dan Luhtfi yang telah melalui masa perkuliahan bersama, masa skripsi bersama, dan teman seperjuangan bersama.
13. Untuk Bapak Agung sekeluarga di Boyolali saya ucapkan terimakasih atas doa dan motivasinya.
14. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kerabat, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran diharapkan demi untuk memperdalam dan kesempurnaan dalam topik ini.

*Wassalamu 'alaikum, wr. wb.*

Yogyakarta, 11 Februari 2020

Laila Nur Rohmah

NIM. 20160610266



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan tentang Pengawasan .....	8
B. Tinjauan tentang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) .....	17
C. Tinjauan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Data Penelitian.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Lokasi Penelitian .....	35
E. Narasumber.....	35
F. Teknik Analisis Data .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B.	Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bantul .....	44
C.	Faktor Penghambat Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantul terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bantul.....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR BAGAN

Bagan IV. 1. Struktur Organisasi Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul .....	44
Bagan IV. 2. Proses Penanganan Pelanggan Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Bantul.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV 1 Peta Kabupaten Bantul.....	37
Gambar IV 2 Logo Bawaslu Kabupaten Bantul .....	42



## DAFTAR SINGKATAN

1. ASN : Aparatur Sipil Negara
2. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. KASN : Komisi Aparatur Sipil Negara
5. KPU : Komisi Pemilihan Umum
6. ORI : Ombudsman Republik Indonesia
7. Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan Umum
8. Pemilu : Pemilihan Umum
9. Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
10. PNS : Pegawai Negeri Sipil
11. PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
12. UU : Undang-Undang

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Jenis dan Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019.....	31
Tabel IV 1. Jenis Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul.....	59



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Netralitas ASN adalah bebasnya ASN dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ASN harus netral baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Pengawasan netralitas ASN baik dalam Pemilu maupun Pilkada salah satunya dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul, ada tiga fungsi Bawaslu yang digunakan dalam proses-proses pengawasan netralitas ASN, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu Kabupaten Bantul untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya Bawaslu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika tahapan-tahapan Pemilu maupun Pilkada berlangsung. Ketika Bawaslu Kabupaten Bantul sudah melakukan pencegahan, pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa yang menjadi bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Bantul maka Bawaslu Kabupaten Bantul akan melakukan penindakan pelanggaran. Di dalam menjalankan fungsinya terhadap pengawasan netralitas ASN di Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul memiliki hambatan, antara lain kurangnya pemahaman regulasi dari masing-masing pengawas sendiri dan ASN.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Bawaslu, Netralitas ASN*